



Media Title	Kompas	
Date	8 September 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	18	Article Size
Journalist	Ody	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

Proyek Jalan Tol Depok-Antasari



KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Aktivitas warga di lahan yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (7/9). Proyek pembangunan tahap I untuk ruas Antasari-Sawangan sepanjang 12 kilometer yang rencana awal selesai 2014 molor dan ditargetkan baru selesai 2016. Pembebasan lahan menjadi salah satu kendala molornya pembangunan infrastruktur ini.

INFRASTRUKTUR

Konsep Tol Laut Perlu Rp 60 Triliun

JAKARTA, KOMPAS – Konsep tol laut yang dibahas dalam visi dan misi pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum diakomodasi sepenuhnya oleh Kamar Dagang dan Industri. Namun, sebagian konsep itu sudah diterjemahkan oleh Kadin.

"Bagi Kadin, problem disparitas harga di Jawa dan luar Jawa sudah lama menjadi masalah. Saat diterjemahkan menjadi koreksi sistem transportasi nasional, maka seperti membuka gagasan yang sudah lama dibuat," kata Wakil Ketua Umum Kadin Natsir Mansyur di Jakarta, Minggu (7/9).

Konsep yang dibuat Kadin menyebutkan, biaya untuk membuat tol laut sebesar Rp 60 triliun. Kadin yakin, biaya sebesar itu tak perlu menggunakan dana APBN. Pembangunannya cukup melibatkan investor swasta. Meski demikian, pemerintah tetap

berperan menyusun kebijakan agar konsep tol laut mudah diimplementasikan.

Konsep tol laut tersebut merupakan rantai transportasi yang bisa menjamin keterhubungan atau konektivitas antarpulau di Indonesia. Dengan konektivitas yang memadai, maka angkutan barang atau logistik menjadi lebih efisien.

Sebelumnya diberitakan (*Kompas*, 28/8), Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung Senator Nur Bahagia menyatakan, biaya logistik nasional tidak efisien. Biaya logistik tersebut mencapai 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebanyak 72,21 persen komponen biaya logistik nasional bersumber dari transportasi darat. Biaya itu jauh melampaui negara tetangga, yakni Singapura sebesar 8 persen, Malaysia sekitar 13

persen, dan Thailand yang sekitar 20 persen.

Selain itu, kata Senator, terjadi ketidakseimbangan muatan antarmoda transportasi. Komponen angkutan barang melalui jalur darat mencapai 90,34 persen dan angkutan penumpang 84,13 persen. Adapun komponen angkutan laut hanya 8,76 persen.

Natsir mengakui, transportasi angkutan barang laut dalam negeri belum terbentuk untuk kepentingan masyarakat kepulauan. Sistem transportasi angkutan laut hanya untuk kapal-kapal tradisional antarpulau. Akibatnya, biayanya tinggi dan tidak efisien. Kondisi ini menyebabkan harga barang, seperti di wilayah Indonesia timur, menjadi mahal.

Agar lebih efisien, perlu kapal-kapal besar untuk angkutan laut. Pemerintah bertugas membangun desain tersebut. Namun, pelaksanaannya bisa diserahkan kepada sektor swasta. (ODY)